

ABSTRAK

Jaminan Sosial Kesehatan (atau biasa disebut JKN) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kesehatan. Dalam hal ini BPJS kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan memiliki peranan penting. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan berasaskan kemanusiaan, kemanfaatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan ini tidak terlepas dari permasalahan . terutama perbedaan pelayanan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab Jaminan Sosial Kesehatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Penelitian ini dilakukan untuk memeparkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak yang seharusnya di berikan kepada pengguna layanan Jaminan Sosial Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian huku m normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyelesaian permasalahan dalam hal pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan tidak hanya didasarkan pada kepercayaan semata tetapi diperlukan langkah pencegahan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya penyediaan jaminan. Rumah Sakit sebagai mitra pemberi layanan bisa mengevaluasi pegawainya untuk memberikan pelayanan sesuai dengan hak yang seharusnya diberikan kepada pasien dan memberikan perlindungan kepada hak pasien yang disalah gunakan. Perlindungan hukum dalam hal pemberian layanan jaminan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengguna Jaminan Sosial Kesehatan. Baiknya pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi nama baik instansi dan tidak menimbulkan kritik sosial yang menyebabkan buruknya citra Rumah Sakit. Oleh karena itu masyarakat akan menerima pelayanan Jaminan Kesehatan tanpa rasa takut, dan kekhawatiran berlebih.

Kata kunci : Jaminan Sosial Kesehatan – pelayanan - perlindungan

ABSTRACT

Social Health Security (or commonly called JKN) is a form of government attention to realizing people's welfare through health. In this case, BPJS Health as the organizer of social health security has an important role. The implementation of social health security is based on humanity, benefit and social justice for all Indonesian people. The implementation of Social Health Security is not free from problems, especially the differentiation of services that often occurs in the implementation of health services in hospitals. This is interesting to research because Social Security and Health are an important aspect of life. This research was conducted to explain the steps taken by the government in terms of providing the rights that should be given to users of Social Security Health Services.

The research method used is normative legal research with a statutory approach combined with a conceptual approach.

The results of this research show that solving problems in terms of Social Health Security services is not only based on trust alone but requires preventive steps by applying the precautionary principle, including providing guarantees. Hospitals as service delivery partners can listen to their employees to provide services in accordance with the rights that should be given to patients and provide protection for patients' rights that are misused. Legal protection in terms of providing health insurance services is really needed by people who use Social Security for Health. The good service provided will affect the good name of the agency and will not give rise to social criticism which will cause a bad image of the hospital. Therefore, people will receive Health Insurance services without excessive fear and worry.